



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2019 – 2023 adalah Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat yang salah satu Misinya adalah Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian Masyarakat Hulu Sungai Selatan. Salah satu basis ekonomi Hulu Sungai Selatan diletakkan pada UMKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Visi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua SKPD terkait sebagai kebijakan implementatif, termasuk di dalamnya Dinas Perdagangan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Tahun 2019 – 2023, kemudian dijabarkan ke dalam Renja (Rencana Kerja Tahunan) .

Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan penjabaran dari Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nanti dan merupakan pengimplementasian kegiatan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023. Hal ini diperlukan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang Pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen. Penyusunan Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menjadi dasar



penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-SKPD) Tahun 2020.

Di dalam dokumen Renja ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi dan Misi Kabupaten dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan awal tahun.

Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah kami susun ini memuat program kegiatan yang seluruhnya mendukung terhadap pencapaian target kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan, Pengelolaan Pasar Nagara dan Bina Perdagangan Daerah.

Dokumen Renja ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renja ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan, Pengelolaan Pasar Nagara dan Bina Perdagangan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020.

Kandangan, 10 Juli 2019

Kepala Dinas Perdagangan,



H. M. SUFIANI, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP. 19590705 198402 1 006



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk



mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Laporan Kinerja).

Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang perekonomian yakni Bidang Pengelolaan Pasar Kandang, Pengelolaan Pasar Nagara dan Bina Perdagangan Daerah berkewajiban juga menyusun rencana strategis kemudian menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja (RENJA Tahun 2020). Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 yang disusun oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.



Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 disusun untuk jangka waktu tahun berjalan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun



- 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. 3. 1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Sebagai *road map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Dinas Perdagangan untuk pencapaian visi organisasi.
2. Menterjemahkan secara teknis pelaksanaan Revisi Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kab. HSS.
3. Menyusun perencanaan pembangunan yang lebih fungsional dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan



4. Untuk menyatukan langkah dan gerak serta komitmen Dinas dalam meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kerja bidang perdagangan.
6. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan terhadap Pelaku usaha Ekonomi.

1.3.2. Tujuan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Melaksanakan penyesuaian terhadap kegiatan dan anggaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020.
2. Merencanakan peningkatan sistem pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi, baik Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan, Pengelolaan Pasar Nagara dan Bina Perdagangan Daerah.
3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
4. Memanfaatkan perangkat organisasi yang tersedia dalam melaksanakan Pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi terutama yang ada di masyarakat..
5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan kepada pelaku ekonomi dan masyarakat pada umumnya secara prima.
7. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Perdagangan Kab. HSS;



8. Menciptakan sinergitas perencanaan, kepastian, keterpaduan, keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabilitas;
9. Memberikan pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kab. HSS

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 .Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU (2018)

2.1.1. EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2018 merupakan hasil kinerja Dinas Pedagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama Tahun 2018 yaitu suatu gambaran menyeluruh atas kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran yang telah dilaksanakan, pendekatan yang dilakukan berdasarkan kegiatan-kegiatan aktifitas yang dilaksanakan serta sasaran-sasaran yang dapat dicapai, secara rinci kegiatan-kegiatan program dimaksud dapat dijelaskan sebagaimana tergambar pada masing-masing indikator kinerja kegiatan Tahun 2018 sebagai berikut :

A. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada DINAS PERDAGANGAN KAB. HSS Termasuk Gaji, Tunjangan Daerah dan Tunjangan Kehormatan (Apabila Ada)

Program / Kegiatan	PAGU	REALISASI*	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG			
1. Gaji dan Tunjangan.	2.525.702.000	2.219.593.054	87,88
2. Tambahan Penghasilan.	1.101.329.000	928.192.970	84,28
BELANJA LANGSUNG			
A. Program Pelayanan Adm. Perkantoran			
1. Penyediaan jasa surat menyurat.	4.000.000	2.580.000	64,50
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	59.600.000	34.498.296	57,88
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.700.000	4.843.800	72,30
4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000	10.934.800	99,41
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.	11.350.000	7.355.000	64,80



Program / Kegiatan	PAGU	REALISASI*	%
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.	22.920.000	22.872.500	99,79
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	29.300.000	27.652.938	94,38
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	9.225.000	9.192.500	99,65
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	68.725.000	68.700.000	99,96
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.	4.800.000	3.310.000	68,96
11. Penyediaan makanan dan minuman.	17.100.000	15.600.000	91,23
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	362.000.000	360.968.173	99,71
13. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	74.400.000	68.137.443	91,58
14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	135.300.000	134.758.000	99,60
B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.	195.900.000	194.775.500	99,43
2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional.	74.400.000	61.480.006	82,63
C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			
1. Penyusunan laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.510.000	7.399.750	98,53

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada BIDANG BINA PERDAGANGAN DAERAH

Program / Kegiatan	PAGU	REALISASI*	%
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa	69.775.000	45.625.000	65,39
2. Sosialisasi Perlindungan Konsumen	74.295.000	74.279.000	99,98
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
1. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	32.450.000	32.450.000	100
2. Pelaksanaan Promosi /Pameran Produk Unggulan Daerah	657.725.000	642.172.728	97,64



C. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada BIDANG PENGELOLAAN PASAR KANDANGAN.

Program / Kegiatan	PAGU	REALISASI*	%
Program Penertiban Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pasar			
1. Penertiban pedagang/pedagang kaki lima pasar kandang	356.550.000	312.399.000	87,62
2. Pelayanan dan penanggulangan kerusakan bangunan pasar kandang	1.864.405.000	1.769.345.264	94,90
3. Pemeliharaan kebersihan pasar kandang	242.695.000	238.442.850	98,25

D. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada BIDANG PENGELOLAAN PASAR NAGARA.

Program / Kegiatan	PAGU	REALISASI*	%
Program Penertiban Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pasar			
1. Penertiban pedagang/pedagang kaki lima pasar nagara	134.200.000	134.000.000	99,85
2. Pelayanan dan penanggulangan kerusakan bangunan pasar nagara	410.815.000	404.900.000	98,56
3. Pemeliharaan kebersihan pasar nagara	29.410.000	29.410.000	100

2.1.1. Capaian Renstra SKPD

Capaian Renstra SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai saat ini, secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :



Tabel 2.2
Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Kab. HSS Tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Usaha Sektor Perdagangan	Meningkatnya Usaha Sektor Perdagangan	1. Persentase unit sektor perdagangan yang meningkat statusnya	%	19,43	8,8	45,29
			2. Persentase pelaku usaha perdagangan non formal menjadi pedagang formal	%	38,32	58,82	153,49
2	Meningkatkan Usaha Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Usaha Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan yang di Tera / Tera Ulang	%	100	100	100
3	Menyediakan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten	Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten	1. Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten	%	100	100	100
			2. Persentase Sarana distribusi perdagangan yang menjadi titik pemantauan harga	%	100	100	100
4	Meningkatkan kualitas akuntabilitas dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas dan pelayanan publik	1. Nilai hasil Evaluasi AKIP Dinas Perdagangan	Poin	A	A (80,14)	100
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perdagangan	Nilai	81	81,26	100,3
5	Meningkatkan tata kelola sarana distribusi perdagangan	Meningkatnya tata kelola sarana distribusi perdagangan	1. Persentase kapasitas tempat berjualan terhadap pedagang	Pasar Kandang	88,33	88,33	100
				Pasar Nagara	91,62	91,62	100
			2. Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Pasar Kandang	87,5	87,5	100
				Pasar Nagara	66,67	66,67	100
			3. Jumlah pajak retribusi sarana perdagangan yang dapat dipungut dibandingkan rencana PAD	Rp.	4,06 M	3,67 M	90,4
Capaian Kinerja							



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Renstra Dinas Perdagangan Kab. HSS umumnya telah memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat dua sasaran renstra yang belum tercapai.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang belum mencapai target yaitu :

- 1. Persentase unit sektor perdagangan yang meningkat statusnya**, target belum tercapai dikarenakan semakin banyak kegiatan peningkatan status unit sektor perdagangan tetapi penambahan unit sektor yang belum dibina juga semakin bertambah. Sehingga tidak mengurangi jumlah yang ada.
- 2. Jumlah pajak retribusi sarana perdagangan yang dapat dipungut dibandingkan rencana PAD**, target belum tercapai dikarenakan ada beberapa kendala dalam melakukan pemungutan retribusi yang perlu di tindaklanjuti melalui Perda yang berisi tentang sanksi bagi toko yang tidak mau membayar pajak retribusi toko.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan kebijakan pembangunan dibidang perdagangan dan tata kelola pasar (Permendagri No. 13 Tahun 2006), maka Dinas Perdagangan mempunyai 7 (tujuh) Program yakni ; 3 (tiga) program rutin dan 4 (empat) program operasional yang diimplementasikan dalam 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Kinerja yang sesuai SPM maupun IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ada pada Dinas Perdagangan, dimana Dinas Perdagangan merupakan urusan pilihan, sedangkan Pelayanan yang ada di Dinas Perdagangan yaitu :



Pelayanan Pemungutan Hasil Retribusi Daerah, antara lain

- 1) Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari :
 - Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
 - Retribusi Pelayanan Pasar – Los
 - Retribusi Pelayanan Pasar – Kios
 - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 2) Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari :
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan dalam penarikan retribusi ini akan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Kalsel Cabang Kandangan dan dilaporkan pada aplikasi SIMDA Keuangan.

I. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada SEKRETARIAT

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, telah berhasil menyediakan keperluan benda pos untuk surat menyurat kantor selama satu tahun.
 - b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan rekening telepon, air, listrik dan internet kantor.
 - c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional telah berhasil mencapai terbayarnya pajak dan service 9 buah kendaraan dinas selama satu tahun.
 - d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD telah berhasil menyediakan dana untuk pawai mobil



hias dan pembuatan stand pameran dalam rangka peringatan hari jadi Kab. HSS.

- e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja telah berhasil menyediakan pemeliharaan peralatan kantor selama satu tahun.
- f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor telah berhasil menyediakan keperluan alat tulis kantor selama satu tahun.
- g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah berhasil menyediakan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun.
- h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil mencapai tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor selama satu tahun.
- i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun.
- j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan bahan bacaan kantor (surat kabar).
- k. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan makan minum rapat staf, rapat koordinasi dan tamu.
- l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan pembayaran SPPD ke luar daerah.



- m. Kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan jasa non PNS.
 - n. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan SPPD dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Kegiatan pembangunan gedung kantor, telah berhasil dilaksanakan pemeliharaan/perbaikan WC kantor, pembuatan tempat parkir dan Pemasangan Paving blok lantai parkir serta pembuatan jembatan kantor, pembuatan dan pengecatan gudang penyimpanan tenda kuliner dan pemasangan paving blok pasar hamayung Kec. Daha Utara.
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah berhasil dilaksanakan service untuk 2 (dua) buah kendaraan dinas/operasional dan penggantian suku cadang untuk 1 (satu) buah kendaraan kepala dinas, serta pembayaran BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas/operasional yaitu mobil Kepala Dinas dan mobil operasional.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi SKPD, telah berhasil dilaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan selama satu tahun yaitu Revisi Renstra, Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Prognosis dan Laporan Keuangan.



II. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada BIDANG BINA PERDAGANGAN DAERAH

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan, terdiri dari kegiatan :

- a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, telah berhasil menyelesaikan kegiatan Tim Teknis Keamanan Pangan, menyelesaikan Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang serta Kegiatan Pelayanan Ukur Ulang pada pasar-pasar dan tempat-tempat yang ada menggunakan alat ukur lainnya.
- b. Sosialisasi Perlindungan Konsumen, telah berhasil melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen pada semua kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri,

terdiri dari kegiatan :

- a. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, telah berhasil menyelesaikan kegiatan pengadaan peralatan pendukung kegiatan peningkatan system jaringan informasi perdagangan antara lain :
 - Aplikasi Informasi Harga Sembako, website dan informasi produk lokal (Aplikasi Sihapok).
 - Papan nama dan Running Teks pasar Angkinang.
 - Papan nama pasar Taniran.
- b. Pelaksanaan Promosi/Pameran Produk Unggulan Daerah, telah berhasil menyelesaikan 5 (lima) kegiatan Expo, yaitu :
 - Pameran Nusantara Expo di Taman Mini Indonesia Indah
 - Pameran dalam Rangka Festival Banjar di Taman Ismail Marzuki Jakarta.



- Kalsel Expo 2018 di Lapangan Murjani Banjarbaru dalam rangka HUT Propinsi Kalsel.
- Pameran STQ/MTQ dalam Rangka STQ/MTQ Tingkat Propinsi Kalsel di Kabupaten Tabalong.
- HSS Expo 2018 dalam rangka HUT HSS di Kandangan.

III. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada BIDANG PENGELOLAAN PASAR KANDANGAN

Program Penertiban dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdagangan, terdiri dari kegiatan :

1. Penertiban pedagang/pedagang kaki lima Pasar Kandangan, telah berhasil menyelesaikan kegiatan rapat dengan pedagang, penataan dan penertiban pedagang dan kegiatan pengadaan pakaian harian dan jas hujan petugas keamanan pasar.
2. Pelayanan dan penanggulangan kerusakan bangunan pasar Kandangan, telah berhasil menyelesaikan kegiatan :
 - Verifikasi Data Piutang Toko/Ruko Pasar
 - Pembuatan Meja Pasar Ramadhan dan Pembukaan Kegiatannya.
 - Belanja Pakaian Harian petugas retribusi (Seragam, kaos, rompi, tas dan jas hujan)
 - Pemeliharaan Bangunan (Pasar Taniran, pembuatan drainase dan WC pasar Ikan dan Pangan, kanopi Pasar Kandangan dan Rehabilitasi Pasar Kayu Manis Kecamatan Loksado).
 - Belanja Soil Test Lokasi Rencana Pembangunan Pasar (Dana TP).
 - Belanja Konsultan Aprisal Pengadaan Tanah.



- Pengadaan dan pemasangan lampu sorot di Pasar Ikan dan Pangan Kandangan.
 - Pengadaan dan pemasangan kamera CCTV di lokasi Pasar Kandangan.
 - Belanja Masterplan Pasar Terpadu H. M. Yusi.
 - Pekerjaan Perkerasan Jalan Pasar Ikan dan Pangan.
3. Pemeliharaan Kebersihan Pasar Kandangan, telah berhasil menyelesaikan kegiatan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pertokoan, baputik ratik (gotong royong kebersihan pasar) dan belanja seragam dan kaos petugas kebersihan.

IV. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada BIDANG PENGELOLAAN PASAR NAGARA

Program Penertiban dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdagangan, terdiri dari kegiatan :

1. Penertiban pedagang/pedagang kaki lima Pasar Nagara, telah berhasil menyelesaikan kegiatan rapat dengan pedagang, penataan dan penertiban pedagang pasar nagara.
2. Pelayanan dan penanggulangan kerusakan bangunan pasar Nagara, telah berhasil menyelesaikan kegiatan :
 - Biaya Pembukaan Pasar Ramadhan.
 - Pembuatan tangga tepian dermaga.
 - Pembuatan Atap Kaki Lima Blok E.
 - Pemasangan Paping blok di Blok E
 - Perbaikan Nat Keramik Blok E.
 - Perbaikan Atap Toko Dermaga Andi Tajang
 - Pemeliharaan DAK Blok C



- Perbaiki kanopi Ruko
 - Perbaiki pagar besi
 - Pembuatan kanopi selasar pedagang kaki lima
3. Pemeliharaan Kebersihan Pasar Nagara, telah berhasil menyelesaikan kegiatan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pertokoan pasar nagara.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi dan perlindungan konsumen serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perdagangan.
- b. Merumuskan kebijakan di Bidang Pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen.
- c. Melaksanakan Pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen.



- d. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen.
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen.
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Melaksanakan administrasi Dinas Perdagangan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi tersebut diatas ada beberapa isu penting (Isu Strategis) yaitu :

1. Masih kurangnya keselarasan antar dokumen dan komponen perencanaan.
2. Belum optimalnya Pemanfaatan referensi data dan informasi dan kurangnya kelengkapan data dibidang perdagangan.
3. Kondisi sarana distribusi perdagangan kurang memadai bagi pedagang dan konsumen.
4. Kurangnya kesadaran dan ketaatan pedagang dan konsumen terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi.
5. Belum optimalnya pelayanan kualitas kelembagaan dan sumber daya aparatur Dinas Perdagangan.



2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Renja SKPD Tahun 2020 ini berbeda dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dimana Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sesuai Renstra Dinas Perdagangan. Pada Renja 2020 ini kegiatan berdasar pada RPJMD 2018 – 2023, sehingga program dan kegiatannya menyesuaikan.

Semua Program dan kegiatan yang sesuai RENSTRA Dinas Perdagangan, Pengukuran, Pencapaian dan Sasarannya dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Adm. Perkantoran		Tingkat Kepuasan Pelayanan	100 persen	1.860.069.500
1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Jasa dan administrasi kantor yang tersedia	1 tahun	56.969.500
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pembayaran biaya rekening air, listrik dan telepon yang tersedia	1 tahun	58.500.000
3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Kabupaten	Jumlah pelaksanaan pawai pembangunan dan HSS Expo yang diikuti	2 kegiatan	14.000.000
4	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. SKPD	Pembayaran biaya makan dan minum untuk rapat-rapat/kegiatan & tamu	1 tahun	25.200.000
5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Kab. SKPD	Petugas teknis/ tenaga kontrak yang tersedia	1 tahun	1.003.400.000
6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Kabupaten	Kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan yang diikuti	1 tahun	702.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Kepuasan Pelayanan	100 persen	403.517.000
1	Pembangunan Gedung kantor	Kabupaten	Gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	300.000.000



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun	12.667.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Peralatan dan perlengkapan mobil serta kendaraan operasional kondisi baik	1 tahun	79.050.000
4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	1 tahun	11.800.000
III	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP dan Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen Keuangan Daerah	100 persen	10.000.000
1	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 buah	5.000.000
2	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	15 buah	5.000.000
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan	83 Indeks	334.040.500
1	Penataan Pasar Kandangan	Kab.	Jumlah jaringan sarana distribusi yang memenuhi standar	7 pasar	206.487.500
2	Penataan Pasar Nagara	Kab.	Jumlah jaringan sarana distribusi yang memenuhi standar	100 persen	77.845.000
3	Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan	Kab.	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan (kemetrolagian)	35 jt Rp.	32.508.000
4	Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Kandangan	Kab.	Jumlah Pendapatan Sub Sektor Perdagangan (pelayanan pasar)	3,75 M	9.860.000
5	Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Nagara	Daha Utara, Sel., Barat	Jumlah Pendapatan Sub Sektor Perdagangan (pelayanan pasar)	0,55 M	7.340.000
VI	Program Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan		Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal	9,54 persen	817.118.000
1	Pelaksanaan Promosi/Pameran Produk Unggulan Daerah	Kab.	Jumlah jaringan pemasaran antar daerah	6 kegiatan	736.850.000
2	Pengendalian Harga Bahan Pokok	Kab.	Jumlah kegiatan penyebaran informasi dan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok masyarakat	3 kegiatan	80.268.000



VI	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan		PAD Sub Sektor Perdagangan	38 jt rupiah	91.425.000
1	Pelayanan Tera dan Tera Ulang	Kab.	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan (kemetrolgian)	38 jt Rp.	91.425.000
2	Pelayanan Tera dan Tera Ulang (DAK)	Kab.	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan (kemetrolgian)	38 jt Rp.	0
VII	Program Peningkatan Sarana dan Jaringan Distribusi Perdagangan		Persentase Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik;	97,43 persen	2.275.210.000
			PAD sub sektor perdagangan	4,3 M Rupiah	
1	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan	Kab.	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Pasar Kandangan Dalam Kondisi Baik	7 pasar	1.534.110.000
2	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Nagara	Daha Utara, Sel., Barat	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Pasar Nagara Dalam Kondisi Baik	3 pasar	741.100.000
3	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan (DAK)	Kab.	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Pasar Kandangan Dalam Kondisi Baik	7 pasar	0

2.5 PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, LSM, Asosiasi dan lain-lain tidak ada pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari 2 (dua) target kebijakan tersebut di atas, maka kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pedagang non formal agar dapat tumbuh menjadi pedagang formal
2. Melaksanakan pengujian Kemetrolagian untuk terciptanya Hak-hak Perlindungan Konsumen secara berkala
3. Meningkatkan jumlah titik pantau harga
4. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan di daerah
5. Melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan pasar dengan melengkapi sarana prasarana, retribusi dan ketertiban parkir pasar dengan lebih baik serta mengoptimalkan kegiatan kebersihan pasar



6. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan dan pembangunan sarana distribusi perdagangan
7. Melaksanaaan pengawasan dan peningkatan serta pembinaan terhadap potensi pajak dan retribusi di sektor perdagangan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sesuai dengan Renstra SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tujuan dan sasaran.

3.2.1 Tujuan

Tujuan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan RENSTRA adalah **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan.**

3.2.2 Sasaran

Sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan RENSTRA adalah **Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.**

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:



Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kab.HSS Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			0	Non Urusan								
			0	-								
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik (Nilai/Predikat AKIP)	0 0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	100 Persen	10,000,000			100 Persen	
			0.00..007.7	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 buah	5,000,000	Pendapatan Daerah	SKPD	12 buah	5,000,000
			0.00..007.8	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	15 buah	5,000,000	Pendapatan Daerah	SKPD	15 buah	5,000,000
			0 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pelayanan	100 persen	1,860,069,500			100 persen	
			0.00..001.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Jasa dan administrasi kantor yang tersedia	1 tahun	56,969,500	Pendapatan Daerah	Lokasi SKPD	6 jenis	56,969,500
			0.00..001.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pembayaran biaya rekening air, listrik dan telepon yang tersedia	1 tahun	58,500,000	Pendapatan Daerah	Lokasi SKPD	15 rekening	58,500,000
			0.00..001.4	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Kabupaten	Jumlah pelaksanaan pawai pembangunan dan HSS Expo yang diikuti	2 kegiatan	14,000,000	Pendapatan Daerah	Lokasi SKPD	2 kegiatan	14,000,000





Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

			0.00..001.6	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten, SKPD	Pembayaran biaya makan dan minum untuk rapat-rapat/kegiatan & tamu yang tersedia	1 tahun	25,200,000	Pendapatan Daerah	Lokasi SKPD	5 kegiatan	25,200,000
			0.00..001.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Kabupaten, SKPD	Petugas teknis/tenaga kontrak yang tersedia	1 tahun	1,003,400,000	Pendapatan Daerah	SKPD dan Kab.	52 orang	1,003,400,000
			0.00..001.9	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Kabupaten	Kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan yang diikuti	1 tahun	702,000,000	Pendapatan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 tahun	702,000,000
	0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat kepuasan pelayanan	100 persen	403,517,000			100 persen	
			0.00..002.3	Pembangunan gedung kantor	SKPD	Gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	300,000,000	Pendapatan Daerah	Lokasi SKPD	2 jenis	300,000,000
			0.00..002.14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun	12,667,000	Pendapatan Daerah	Lokasi SKPD	6 jenis	12,667,000
			0.00..002.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Peralatan, perlengkapan mobil serta kendaraan operasional kondisi baik	1 tahun	79,050,000	Pendapatan Daerah	SKPD	4 unit	79,050,000
			0.00..002.31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten, SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	11,800,000	Pendapatan Daerah	SKPD dan Kab.	5 jenis	11,800,000
	0	0	10	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan	83 Indeks	334,040,500			83 Indeks	
			0.00..010.30	Penataan Pasar Kandangan	Kabupaten	Jumlah jaringan sarana distribusi yang memenuhi standar	7 pasar	206,487,500	Pendapatan Daerah	Kabupaten	8 pasar	206,487,500
			0.00..010.31	Penataan Pasar Nagara	Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat	Jumlah jaringan sarana distribusi yang memenuhi standar	3 pasar	77,845,000	Pendapatan Daerah	Daha Selatan dan Daha Utara	3 pasar	77,845,000





Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

			0.00..010.58	Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan	Kabupaten	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan (kemetrolagian)	35.000.000 Rupiah	32,508,000	Pendapatan Daerah		38.000.000 Rupiah	32,508,000	
			0.00..010.59	Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Kandangan	Kabupaten	Jumlah Pendapatan Sub Sektor Perdagangan (pelayanan pasar)	3,75 M Rupiah	9,860,000	Pendapatan Daerah		4 M Rupiah	9,860,000	
			0.00..010.60	Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Nagara	Daha Barat, Daha Selatan, Daha Utara	Jumlah Pendapatan Sub Sektor Perdagangan (pelayanan pasar)	550.000.000 Rupiah	7,340,000	Pendapatan Daerah		600.000.000 Rupiah	7,340,000	
			2			Pilihan							
			2	32		Perdagangan							
2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju Pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	2	32	1	Program Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan		Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal		9,54 persen	817,118,000		8,06 persen
			2.32..001.2	Pelaksanaan Promosi/Pameran Produk Unggulan Daerah	Kabupaten	Jumlah jaringan pemasaran antar daerah	6 kegiatan	736,850,000	Pendapatan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	7 kegiatan	736,850,000	
			2.32..001.5	Pengendalian Harga Bahan Pokok	Kabupaten	Jumlah kegiatan penyebaran informasi dan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok masyarakat	3 kegiatan	80,268,000	Pendapatan Daerah		5 kegiatan	80,268,000	
			2	32	2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		PAD Sub Sektor Perdagangan		38.000.000 rupiah	91,425,000		41.000.000 rupiah
			2.32..002.6	Pelayanan Tera dan Tera Ulang	Kabupaten	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan (kemetrolagian)	38.000.000 rupiah	91,425,000	Pendapatan Daerah		38.000.000 rupiah	91,425,000	





Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

			2.32..002.8	Pelayanan Tera dan Tera Ulang (DAK)	Kabupaten	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan (kemetrolagian)	38.000.000 rupiah	0	APBN (DAK)		38 rupiah	0
		2	32	3	Program Peningkatan Sarana dan Jaringan Distribusi Perdagangan	Persentase Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik;	97,43 persen;	2,275,210,000			97,44 persen;	
						PAD sub sektor perdagangan	4,3 M rupiah				4,4 M rupiah	
			2.32..003.1	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan	Kabupaten	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Pasar Kandangan Dalam Kondisi Baik	7 pasar	1,534,110,000	Pendapatan Daerah		8 pasar	1,534,110,000
			2.32..003.2	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Nagara	Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Pasar Nagara Dalam Kondisi Baik	3 pasar	741,100,000	Pendapatan Daerah		3 pasar	741,100,000
			2.32..003.5	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan (DAK)	Kabupaten	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Pasar Kandangan Dalam Kondisi Baik	7 pasar	0	APBN (DAK)		8 pasar	0
						TOTAL		5,791,380,000				5,791,380,000





BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah disusun dengan mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2018 – 2023 yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan daerah atau Pemerintah Daerah, keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif serta mengembangkan nilai-nilai religius dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja perubahan tahunan (RKPT). Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan baik yang mengarah pada peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, kemandirian, akreditasi dan kualitas pelayanan dan penanaman nilai-nilai religius dalam pemberian pelayanan tersebut.

Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelayanan yang diberikan dapat dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan pelayanan yang prima menuju terciptanya pusat pelayanan jasa perdagangan.



Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat menggambarkan perencanaan yang jelas tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perdagangan Tahun 2020 guna mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Kabupaten yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.